

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI  
PADA PT.STABILISHED PAVEMENT INDO  
(Studi kasus pada PT.Stabilised Pavement Indo Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**YUL YARNITA**  
**NIM. 10973008254**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**



**ABSTRAK**  
**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN KONSTRUKSI**  
**PADA PT.STABILISED PAVEMENT INDO**

**Oleh: Yul Yarnita**

*Penelitian ini dilakukan pada PT.Stabilised Pavement Indo yang beralamat di jalan Bandeng No.34 Tangkerang Tengah Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif pada jasa konstruksi apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan, yang telah dilaksanakan pembayaran pajaknya oleh PT. Stabilised Pavement Indo.*

*Data yang dikumpulkan melalui data sekunder dan pengamatan langsung. Hasil temuan adalah tidak sesuai pemoongan tarif yang dilakukan oleh pemerintah kepada Perusahaan. Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dan perusahaan bisa saja dapat mengajukan keberatan, sebaiknya perusahaan harus lebih dapat menyikapi pemoongan tarif yang sebenarnya mengacu kepada Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya, kemudian perlakuan dalam beban pajak final perusahaan harus lebih teliti dalam menghitung beban pajak setiap tahunnya karena beban pajak final tahun sekarang tidak bisa digabungkan dengan beban pajak tahun sebelumnya karena sudah menjadi ketentuan agar tidak terjadi perbedaan menghitung dan mencatat jumlah beban pajak final didalam Laporan Keuangan dengan Laporan SPT.*

*Sehingga dari hasil penelitian tersebut, ternyata perusahaan dalam membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah menjadi lebih besar pembayaran oleh perusahaan karena di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final dan pasal 23 tentang imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21(yang tidak boleh di gabungan oleh pajak penghasilan yang tidak final) maka dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto itu cukup jelas penjelasannya di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.*

*Kata kunci:Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan pasal23.Pajak Penghasilan pasal4 ayat 2.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunianya-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul: **“Analisis Pajak Penghasilan Konstruksi Pada PT.Stabilised Pavement Indo “**.

Adapun penulis skripsi ini dalam syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian *Oral Comprehensive* untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis telah berusaha menampilkan segala kemampuan yang dimiliki penulis. Berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi yang tidak ternilai dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu . Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Bapak. Prof.Dr.H.M Nazir Karim. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak. Dr.Mahendra Romus. SP,M,Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Doni Martias SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sekaligus Dosen Penasehat Akademis yang telah membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Andri Novius,SE,M.Si.Ak. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Alchudri.MM, CPA. Selaku Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing proposal dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Azhari,S.MA,Ak. Selaku Pembimbing Proposal sekaligus Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya kepada penulis dan membimbing sampai dengan selesai skripsi penulis.
7. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan serta seluruh Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi Penulis.
9. Bapak Direktur Utama Drs.Azhari Nasution dan Staf PT.Stabilised Pavement Indo, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Tercinta, Ayahanda ARMAWI NASUTION dan Ibunda MASNILA PULUNGAN yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dan senantiasa mendoa'kan serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil "setiap tetesan peluh keringatmu buat Ananda dan ketulusan hati yang takkan pernah ananda lupakan sampai akhir hayat ini".
11. Buat Adik-adikku tersayang Sri Wahyuni Nst, Roma Ito Nst, Armansyah Nst, yang juga selalu memberikan semangat dan senantiasa mendoa'kan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat Teman-Teman Akuntansi E Lovers yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis.

13. Buat Temen-Temen KKN Angkatan 2012 di Desa Rawang Kao, Kec Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

14. Buat Teman-Teman Konsentrasi Perpajakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.semoga pengorbanan yang diberikan oleh semua pihak mendapat ridha dari allah swt dan dibalasnya dengan melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka semua.

Akhirnya semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri ."Amin".

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penelitian .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Akuntansi .....	8
2.2 Pajak .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak .....	9
2.2.2 Hukum Pajak .....	10
2.3 Pajak Penghasilan.....	11
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan .....	13
2.3.3 Pajak Penghasilan Final .....	17
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	18
2.4.1 Pemotong Pajak PPH pasal 23 .....	19
2.4.2 Objek Pajak PPH pasal 23.....	19
2.5 Tarif dan Dasar Besarnya Pajak .....	20
2.6 Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan.....	22
2.7 Kewajiban Membayar Pajak .....	23
2.7.1 Bagi Pemotong/Pemungut.....	23
2.7.2 Bagi Pembayaran Sendiri .....	25

2.8 Keberata Pajak.....	25
2.9 Jasa Kontruksi Secara Umum .....	27
2.9.1 Jenis Usaha Jasa Konstruksi.....	29
2.9.1.1 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi .....	30
2.9.1.2 Tujuan Jasa Konstruksi .....	30
2.9.2 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi .....	31
2.9.2.1 Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.....	31
2.9.2.2 Penghasilan dari Luar Usaha Jasa Kontruksi .....	31
2.9.3 Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi .....	32
2.9.4 Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi .....	34
2.9.5 Objek PPH Jasa Konstruksi.....	35
2.9.6 Pemotongan PPh Jasa Konstruksi .....	35
2.9.7 Saat Pemotongan atau Penyetoran .....	36
2.9.8 Tarif dan Dasar Besarnya PPh Jasa Konstruksi .....	36
2.9.9 Pajak dalam Islam .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.4 Analisis Data .....	42

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

4.1 Sejarah Singkat.....	43
4.2 Struktur Organisasi.....	44
4.3 Aktivitas Perusahaan .....	48

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Sifat Pengenaan dan Tarif dalam UU .....	49
5.2 Wajib Pajak dalam Mengajukan Keberatan .....	52
5.3 Perusahaan dalam Menyikapi Pemotongan Tarif .....	54
5.4 Perlakuan Beban Pajak final pada laporan keuangan.....	55



## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel II:	Perbandingan Objek PPH dan Sifat Pengenaan PPh.....	35
Tabel II.I:	Perbedaan Tarif PPh jasa Konstruksi sesuai dengan PP No.51 tahun 2008 dan PP 140 tahun 2000 .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.I : Struktur Organisasi PT.Stabilised Pavement Indo .....	45
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Peranan akuntansi yang meliputi laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi juga digunakan sebagai acuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah, karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan,dan Bentuk Usaha Tetap.

Dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan moderen melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pelayanan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya.

Lingkup jasa pelayanan dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari Rancangan Bangunan: perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan sedangkan pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan dapat mencakup: management proyek, management konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. perluasan objek atas usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2 telah diperjelas dalam pemotongan tarif di dalam UU PPh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak kemudian di jelaskan dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang pemotongan tarif.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai jasa konstruksi

diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Pertama, menurut dari pada sifat pengenaan dan tarif pajak atas jasa penghasilan dari usaha jasa konstruksi menetapkan bahwa atas penghasilan wajib pajak dan bentuk usaha tetap dari usaha bidang konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 semua usaha jasa konstruksi yang mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang berkualifikasi maupun yang tidak memiliki kualifikasi yang telah diatur dalam pasal 23 suhubungan imbalan dengan jasa konstruksi yang pajak penghasilannya tidak di hitung kembali di akhir tahun maka tarifnya sebesar 2% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk sifat pengenaannya diatur di dalam pasal 4 ayat 2 yang perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sifat pengenaan dari pajak penghasilan final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini perusahaan yang bergerak di dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.

Kedua, wajib pajak maupun badan dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan sifat pengenaan dan tarif yang dilakukan oleh si pemotong yang terdapat dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 25 point E, yang upaya hukum keberatan diajukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tempat dimana Wajib Pajak terdaftar dalam mengajukan surat keberatan atas suatu: pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketiga, Perusahaan dalam menyikapi pemotongan tarif 3% yang bersifat final dalam jasa konstruksi yang dipungut oleh pemerintah sehingga membuat para pelaku usaha jasa kontraktor dan pemilik proyek diliputi ketidakpastian akan perlakuan perpajakan, terutama bagi pengusaha jasa konstruksi karena para pelaku usaha jasa konstruksi dalam prakteknya seperti tidak mempunyai acuan sehingga perlakuan atas sifat pengenaan dan tarif menjadi beragam di kalangan usaha jasa konstruksi. dari sisi teknis dan administrasi memudahkan fiskus dalam mengengjot penerimaan pajak tetapi problem utama sistem ini adalah tidak mencerminkan keadilan di karenakan penerapan pajak penghasilan final bagi sebagian besar pengusaha jasa konstruksi dikenakan dengan tarif 3% dapat menjadi sangat memberatkan dan sebaliknya sangat menguntungkan bagi pelaku usaha jasa kontraktor karena mampu memperoleh margin besar perlakuan ketentuan pajak penghasilan final ini lebih merupakan bentuk proteksi pemerintah terhadap pelaku usaha kontraktor tertentu dibandingkan dengan keinginan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Keempat, Perlakuan di Beban pajak penghasilan final harus mencatat sesuai jumlah beban pajak yang terdapat di dalam perusahaan jasa konstruksi di laporan keuangan sebesar Rp.566.013.562 sedangkan dilampiran SPT hanya sebesar Rp.528.461.548 sehingga mempunyai selisih sebesar Rp.37.552.014 di dalam beban pajak final perusahaan dengan adanya permasalahan tersebut diatas, untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN KONSTRUKSI PADA PT. STABILISED PAVEMENT INDO”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi?
2. Bagaimana sebaiknya wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atas pemotongan tarif jasa konstruksi?
3. Bagaimana sebaiknya perusahaan menyikapi dalam pemotongan tarif dalam jasa konstruksi?
4. Bagaimana perlakuan beban pajak final yang dipotong pemerintah pada jasa konstruksi?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi.



2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan keberatan atas pemotongan tarif jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui wajib pajak dalam menyikapi pemotongan tarif jasa konstruksi pada perusahaan.
4. Untuk mengetahui perlakuan beban pajak final yang dipotong pemerintah dalam perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis untuk menambah keterampilan dan pengetahuan di dalam dunia kerja khususnya di perpajakan.
2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk pelaku perpajakan dalam memastikan sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang baik dan benar untuk tahun berikutnya.
3. Sebagai pembelajaran bagi wajib pajak dan pelaku usaha untuk lebih dapat mengetahui yang berkaitan tentang lingkup dari usaha jasa konstruksi.
4. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian untuk permasalahan yang sama.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam memberikan gambaran mengenai skripsi ini yang akan disusun secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang penulis skripsi, perumusan masalah.

BAB II : Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang dibahas untuk menjadi pendukung di bab

pembahasan serta pada bab kesimpulan dan saran. Bab ini membahas tujuan teoritis mengenai sifat pengenaan perpajakan ,pemotongan tarif PPh Badan , dan perbedaan Laporan Keuangan dengan SPT.

**BAB III :** Bab ini merupakan tujuan manfaat penelitian meliputi lokasi penelitian, metodologi penelitian , jenis dan sumber data, serta analisa data, dan sistematika penulisan.

**BAB IV :** Pada bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang memaparkan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur perusahaan, struktur organisasi, serta aktifitas-aktifitas perusahaan.

**BAB V :** Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan dengan cara membandingkan dengan teori dan peraturan perpajakan yang dibahas pada bab II dengan praktek yang dibuat oleh perusahaan .

**BAB VI :** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang mungkin berguna bagi perusahaan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi mempunyai peranan penting dalam sistem ekonomi dan kehidupan sosial kita. Akuntansi merupakan seni menganalisa, pencatatan, pengikhtisaran, pengevaluasian, dan penginterpretasian aktivitas dan status keuangan suatu organisasi serta penyampaian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sistematis berdasarkan prinsip sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu atau periode.

Informasi akuntansi bermanfaat bagi mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang tepat bagi perusahaan didapatkan apabila informasi yang diberikan itu bisa dipercaya. Karena akuntansi memainkan peranan penting untuk menghasilkan informasi yang handal dan terpercaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), agar laporan keuangan terjamin keandalan datanya.

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai:

1. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih satu alternatif di antara alternatif ( Sofyan Safri Harahap. 2005 : 4-5 )
2. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran dari hasil-hasilnya. (*American Institute of Certified Public Accounting/ AICPA*, 2007:15).

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak Menurut Pasal 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Azhari,( 2010 : 23), pajak adalah:

“Harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang- undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontrapertasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

Menurut Adriani,( 2004 : 01 )Pajak adalah:

“Pajak adalah Iuran rakyat rakyat kepada kas negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran

umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah”.

Menurut Soemitro SH, (2007 : 12)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang ( berarti dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### **2.2.2 Hukum Pajak**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah(Fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak ( objek pajak ), siapa yang dikenakan pajak ( subjek pajak ), seberapa besar pajak yang dikenakan ( Tarif ), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contoh: undang-undang pajak penghasilan

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan ( prosedur ) penetapan suatu utang pajak.

- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

### **2.3 Pajak penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum yang diperoleh dalam tahun pajak. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut Asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007.

### **2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (Rudy Suhartono dan Ilyas B, Wirawan, 2010:102)

Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang PPh ada 3 pihak yang menjadi subjek pajak :

#### **a. Orang Pribadi**

- 1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di indonesia atau di luar indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

#### **b. Badan**

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apa Organisasi dan bentuk usaha Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### **c. Bentuk Usaha Tetap**

- 1) Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia.
- 2) Orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.



- 3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, berupa:
- Tempat kedudukan manajemen, Cabang Perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, Pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalan sumber alam, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, proyek konstruksi, dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

d. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

### **2.3.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak sesuai dengan pasal 4 UU PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Premi asuransi
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan tertentu Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian objek pajak atau tidak dikenai objek pajak penghasilan, walaupun menurut Undang-Undang pajak penghasilan suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.berikut ini jenis-jenisYang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badanamil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atausumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yangdiakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yangdibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima olehpenerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah( Menteri Keuangan).
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garisketurunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yangmenjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur denganatau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Warisan
- c. Harta terdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saha atausebagai pengganti penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

### **2.3.3 Pajak Penghasilan Final**

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

PPh final juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya. Oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

## **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas Bentuk Usaha Tetap yang bersal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dari keterangan di atas PPh Pasal 23 mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri dan
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang berasal dari:

- 1) Modal
- 2) Penyerahan jasa
- 3) Penyelenggaraan kegiatan.

Selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dibayarkan atau terutang oleh:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **2.4.1 Pemotong Pajak PPh Pasal 23**

Pemotong pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 UU PPh, anatar lain:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk perusahaan lauar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 antara lain:

1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah(PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

### **2.4.2 Objek Pajak PPh Pasal 23**

Objek PPh Pasal 23 di atur dalam Pasal23 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jumlah jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti

- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e (yaitu hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehubungan yang telah dikenai pajak penghasilan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh.
- 6) Imbalan sehubungan dengan:
  - a. Jasa teknik
  - b. Jasa manajemen
  - c. Jasa konstruksi
  - d. Jasa konsultan
  - e. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.
- 7) Jasa lain
 

Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh di atur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.224 Tahun 2008.

## **2.5 Tarif dan Dasar Besarnya PPh Jasa Konstruksi**

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.



Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) :

- a. Huruf b yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
- b. Huruf b ayat (2a) yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

Yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara Self Assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana diatas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),tarif Pajak Penghasilan yangditerapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

- a.  $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.}$
- b.  $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaranbruto yang tidak memperoleh fasilitas.}$

## **2.6 Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan**

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU KUP adalah:

- a. Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan adalah:
  - 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  - 2) Wajib Pajak Badan di Indonesia.
- b. Pengusaha Kena Pajak (Pasal 6 ayat 1 UU PPN dan PPn BM) diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak adan atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan. Dalam pembukuan tersebut harus dicatat secara terpisah dan jelas jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah.(Pasal 6 ayat 2 UU PPN dan PPn BM).

## **2.7 Kewajiban Membayar Pajak**

Apabila seseorang dan badan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut ini:

### **2.7.1 Bagi Pemotong /Pemungut adalah pihak yang bersangkutan antara lain :**

- a. PPh Pasal 21

Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

c. PPh Pasal 22

Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan lainnya.

d. PPh Pasal 23

Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau oleh badan pemerintah dan subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

e. PPh Pasal 4 Ayat 2( Final)

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh Final juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh

final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

### **2.7.2 Bagi pembayaran sendiri antara lain:**

#### **a. PPh Pasal 25**

Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang dihitung sendiri (self assessment system) oleh wajib pajak.

#### **b. PPh Pasal 29**

Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

## **2.8 Keberatan Pajak**

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas

suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

a. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga

b. Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui :

1. Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerima surat.
2. Pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau E-Filing melalui ASP (Application Service Provider). Penyampaian

surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

c. Dalam Proses Penyelesaian Keberatan

1. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari WP.
2. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak WP yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

## **2.9 Jasa Konstruksi Secara Umum**

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi Dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, apabila Pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut pengenaan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:



### 1. Perencanaan Konstruksi

Adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

### 2. Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

### 3. Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan

## **2.9.1. Jenis Usaha Jasa Konstruksi**

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang “Jasa Konstruksi” yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

### 1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

## 2. Usaha Pelaksana Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

## 3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

### **2.9.1.1 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi**

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berskala kecil dan menengah.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

### **2.9.1.2 Tujuan Jasa Konstruksi**

Adapun Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
4. Jenis dan badan Usaha Konstruksi.

## **2.9.2 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi**

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

### **2.9.2.1 Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi**

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

### **2.9.2.2 Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi**

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa

alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur, Penghasilan jasa giro, Penghasilan bunga deposito dan penghasilan luar usaha lainnya.

### **2.9.3 Kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi**

Dalam ketentuan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PP 140 Tahun 2000 nampaknya hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain. Sementara itu, PP Nomor 51 Tahun 2008 ini nampaknya mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang bersertifikat konstruksi maupun tidak. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan tarif yang berbeda di PP Nomor 51 Tahun 2008 ini.

PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu :

- a) 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil
- b) 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha

- c) 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar
- d) 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha
- e) 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya, pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sedangkan besarnya pajak penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan. jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **2.9.4 Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi**

Di atur dalam dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi di atur dalam Kep.Dirjen Pajak Nomor Kep.170/Pj./2002 tertanggal 28 Maret 2002.

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Azhari, 2010).

Kemudian pajak penghasilan atas jasa konstruksi juga di atur dalam UU PPh dalam pasal 4 ayat 2 (Final), Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. yang dimaksud dengan pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan lainnya .oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh Final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak Final.

### 2.9.5 Objek PPh Jasa Konstruksi

PPh atas jasa konstruksi di atur dalam PP 51 Tahun 2008 dan sebelumnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 untuk Dasar penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II : Perbandingan Objek PPh dan Sifat Pengenaan PPh**

PP No. 51 tahun 2008	PP No. 140 tahun 2000
<p>Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu:</p> <p>a.Layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,</p> <p>b.Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan</p> <p>c.Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.</p>	<p>Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dari Usaha:</p> <p>a.Di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan</p> <p>b.Bidang jasa konstruksi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000(satu miliar rupiah), dikenakan pajak final.</p>

Sumber : Azhari, Perpajakan 1 hal, 163

### 2.9.6 Pemotong PPh Jasa Konstruksi

Pemotong PPh Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

### 2.9.7 Saat Pemotong atau Penyetoran PPh Jasa Konstruksi

- a. Pemotongan PPh Jasa Konstruksi dilakukan pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak dan
- b. Penyetoran PPh Jasa Konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong.

### 2.9.8 Tarif dan Dasar Besarnya PPh Jasa Konstruksi

Besarnya perbedaan PPh jasa konstruksi yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam PP No 51 tahun 2008 dan PP 140 Tahun 2000 adalah sebagai dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II. 1 : Perbedaan tarif PPh jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 dan PP No. 140 tahun 2000**

PP No. 51 tahun 2008	PP No.140 tahun 2000
Jasa pelaksanaan sifat final	Pengusaha memiliki kualifikasi di bawah 1 Milyar (pengusaha kecil) sifat Final
a. a.2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.	a. a.4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi.
b. b.4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.	b. b.2%(dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi
c. c.3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa pelaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam keterangan a dan b (memiliki kualifikasi bukan pengusaha kecil).	c. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi
Jasa perencanaan dan pengawasan	pengusaha memiliki kualifikasi di atas 1 Milyar (bukan pengusaha kecil) sifat tidak final.
d. a.4% (empat persen) untuk	d. $4\% \times \text{jumlah bruto}$ yaitu $15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times \text{jumlah bruto}$ yang diterima wajib pajak penyedia



<p>perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.</p> <p>e. b.6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.</p>	<p>jasa perencanaan konstruksi.</p> <p>e. <math>2\% \times \text{jumlah bruto yaitu } 15\% \times 13 \frac{1}{3}\% \times \text{jumlah bruto}</math>) yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</p> <p>f. <math>c.4\% \times \text{jumlah bruto } 15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times \text{jumlah bruto}</math>) yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.</p>
---	--

Sumber : Azhari, Perpajakan 1 hal, 165

### 2.9.9 Pajak Dalam Islam

Dalam perkembangannya, ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah, ringkasannya sebagai berikut:

1. Yusuf Qardawiberpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazi Inayyah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah.

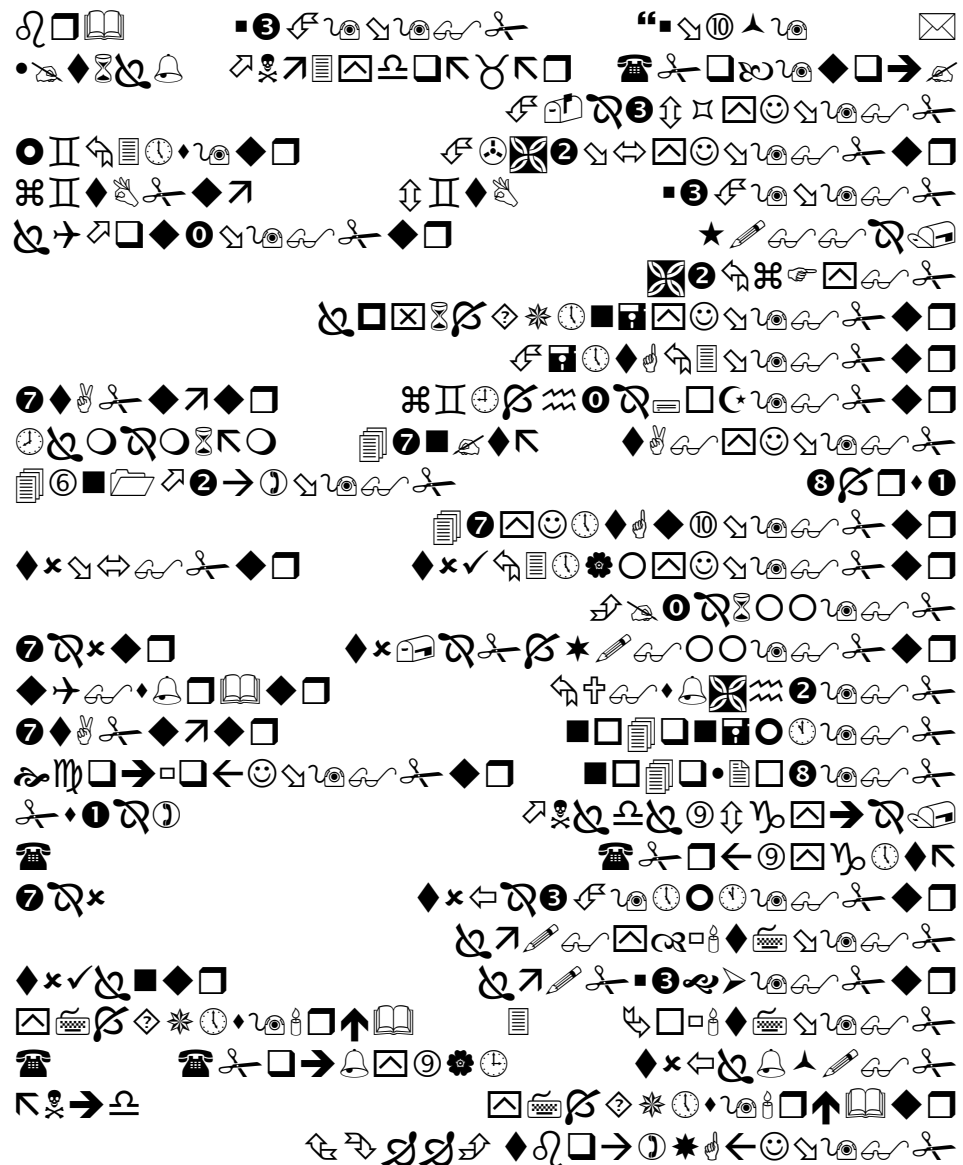
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal telah diisi kembali, diwajibkan kepada kaum muslimin yang kaya, dan digunakan untuk kepentingan orang banyak. (Gusfahmi: 2007)

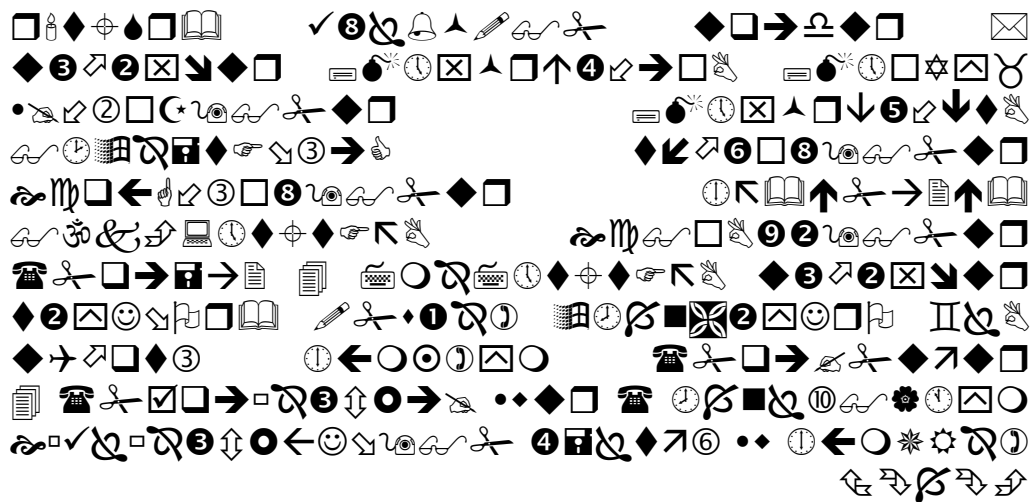
Pajak dan zakat di banyak negara muslim tersebut kemudian mengerucut pada dominasi pendapat pertama yang menganggap zakat dan pajak itu adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Sedangkan pendapat kedua yang memisahkan antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan negara sesungguhnya adalah upaya yang tidak realistis untuk saat sekarang. Selain itu pendapat kedua ini juga membuka jalan bagi umat Islam untuk tidak mengindahkan perintah negara dan tidak berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang terpenting adalah perintah agama, tidak perlu aktif terlibat dalam negara. Ulama berbeda pendapat apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersilah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177:

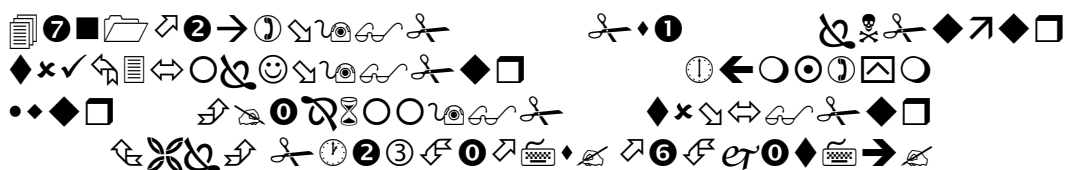


Artinya : Bukanlah menghadap wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir( yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta dan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, maka itulah orang-orang yang benar dan yang bertaqwa.(Q.S Al-Baqarah 177).

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di indonesia) yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. Zakat merupakan salah satu rukun islam, karena itu status hukumnya wajib, sama dengan rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Qur'an berikut ini:



Artinya : *dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama rasanya makanlah dari buahnya bila dia berbuah , dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan.*(QS. Al-An'am: 141)



Artinya : *dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*"(Al-Isra:26).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana dari

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban .

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal ini adalah :

##### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT.Stabilised Pavement Indo Jalan. Bandeng No. 34 Tangkerang Tengah Pekanbaru Pada Bagian Perpajakan dan Akuntansi Penelitian ini dilakukan Pada Tanggal 20 Januari Sampai dengan 25 Januari 2013.

##### **3.2 Jenis dan Sumber data yang digunakan penulis**

Dalam penelitian ini di gunakan penulis yaitu:

- 1) Data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2011 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.
- 2) Data Sekunder berupa data internal yang di peroleh dari objek yang diteliti berupa data laporan keuangan, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu: SPT tahunan tahun 2011 serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan jasa konstruksi.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara dengan bagian staf accounting untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan keuangan, serta SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan PT.Stabilised Pavement Indo.

### **3.4 Analisis Data**

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kuantitatif yang mana semua data yang telah terkumpul di analisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Stabilised Pavement Indo merupakan salah satu perusahaan milik swasta yang terletak di Kota Pekanbaru. perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang meliputi Konstruksi Jalan, Airport, dan Pelabuhan yang difokuskan pada Teknologi Perkerasan.

Menurut Sejarahnya PT. Stabilised Pavement Indo sejak didirikan tahun 2001 di indonesia, merupakan suatu group perusahaan yang sudah sangat berpengalaman khususnya dengan prosedur daur ulang (Recycling). didirikan atas Notaris H.Adrianto SH, No.27 tertanggal 29 Agustus 2001, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dalam surat keputusan NO.C-08565 HT.01.01.Thn 2001 tangaal 18 september 2001, yang berlokasi di Jalan. Bandeng No.34 Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.

PT.Stabilised Pavement Indo didirikan dengan modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 3.377.500.000 ( Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). perusahaan yang awal berdirinya sampai saat ini, dibidang jasa kontraktor. dengan pengelolaan yang baik, perusahaan ini terus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian.

Maksud dan tujuan dari didirikannya PT.Stabilised Pavement Indo adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Jalan, Air Port dan Pelabuhan.



- b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor terdepan di Indonesia pada umumnya, termasuk keuntungan bagi semua Stock Holder (Pemilik Saham, Pelanggan, Supplier, dan Karyawan).
- c. Menjalankan usaha dengan mempromosikan teknologi baru dalam konstruksi perkerasan dan melaksanakan Proyek-Proyek.
- d. Berupaya maksimal untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan mutu, waktu dan biaya yang ditetapkan untuk mencapai kepuasan pelanggan demi mencapai kesejahteraan bersama.

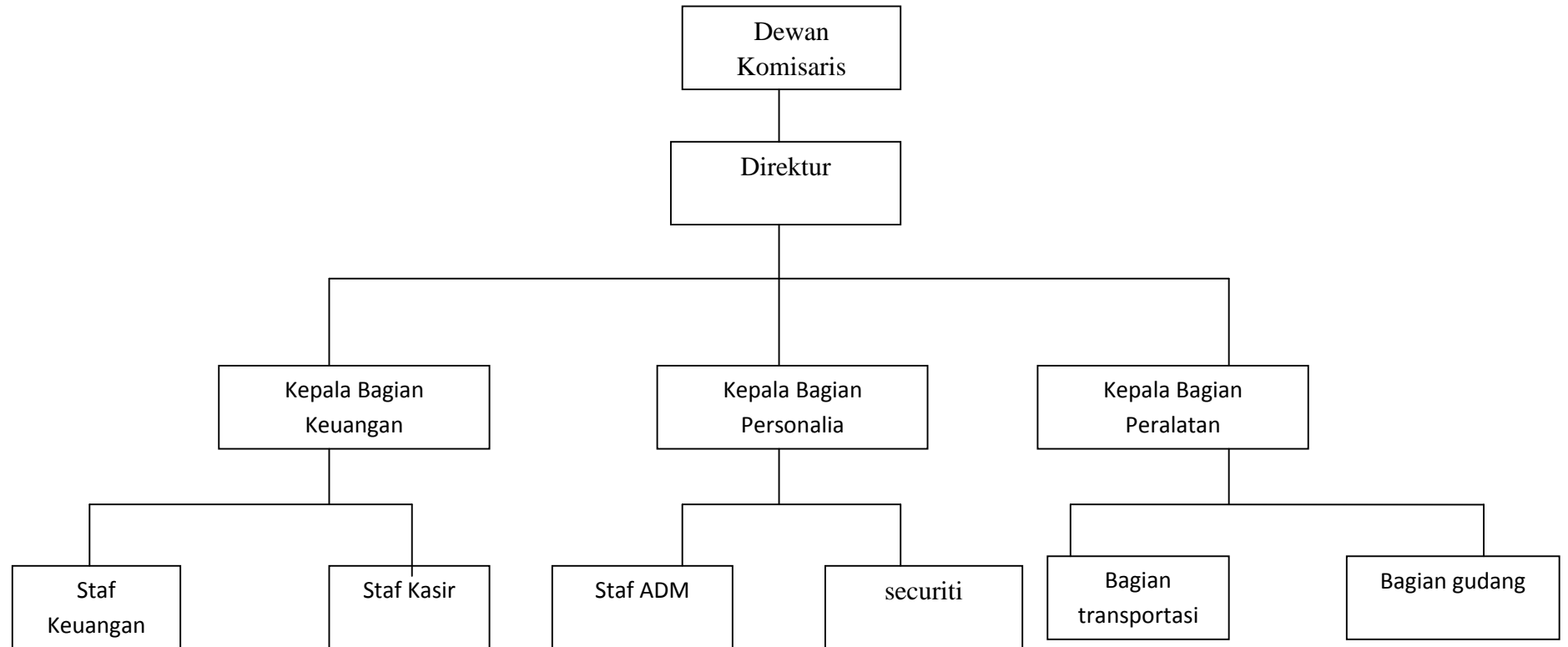
#### **4.2 Struktur Organisasi**

Keberadaan struktur organisasi didalam suatu perusahaan sangat penting artinya, terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang memadai pada umumnya bersifat sederhana dan fleksibel serta memperlihatkan secara tegas batas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada organisasi itu.

Bentuk struktur organisasi yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana adalah bentuk garis atau line. Begitu juga dengan bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Stabilised Pavement Indo. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai bentuk dan susunan struktur organisasi perusahaan ini, dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar IV.I :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. STABILISED PAVEMENT INDO**



Sumber : PT. Stabilised Pavement Indo

Berikut ini diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur Organisasi PT.Stabilised Pavement Indo secara garis besar:

- 1) Dewan Komisaris bertugas mengawasi aktivitas perusahaan yang dipimpin oleh direktur. Komisaris mempunyai hak dan untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur melalui Rapat Pemegang Saham.

## 2) Direktur

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah meliputi:

- a. Melaksanakan program kerja yang telah disusun.
- b. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan di semua departemen.
- c. Menggantikan direktur utama perusahaan apabila direktur utama berhalangan dalam melaksanakan suatu tugas yang di bebaskan kepadanya.
- d. Meminta pertanggung kepada masing-masing kepala bagian atas pelaksanaan tugas yang dijalankan.
- e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya pada direktur utama perusahaan.

## 3) Kepala Bagian Akuntansi

Kepala bagian akuntansi membawa sub bagian:

- a. Staf pembukuan
- b. Pajak
- c. Kasir

Tugas dan tanggung jawab kepala bagian akuntansi adalah, meliputi:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan dan administrasi keuangan.
  2. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas akuntansi dan keuangan perusahaan.
  3. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang
  4. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kasir perusahaan
  5. Mengkoordinasi pembuatan laporan dan hasil kerjanya serta mempertanggung jawabkan kepada direktur perusahaan.
- 4). Kepala bagian personalia meliputi:

Tugas dan tanggung jawab dari kepala bagian personalia meliputi:

1. Melaksanakan program kerja yang dibebankan direktur perusahaan.
2. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan karyawan perusahaan.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan satpam dan staff administrasi perusahaan.
4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya pada direktur perusahaan.

5). Kepala bagian peralatan adalah:

1. Bagian transportasi

Bertugas mengawasi jalannya operasi transportasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan.

## 2. Bagian gudang

Bertugas mengawasi peralatan gudang dalam perusahaan.

### **4.3 Aktivitas Perusahaan**

Aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran perusahaan. Dengan aktivitas perusahaan yang lancar diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal.

Adapun aktivitas perusahaan yang ada di perusahaan yang ada di perusahaan konstruksi antara lain: Jalan, Air Port, dan pelabuhan. Dalam pembangunan tersebut, perusahaan akan menggunakan material, pekerja dan alat pendukung lainnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dalam suatu kegiatan dalam ruang lingkup jasa konstruksi.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini adalah inti dari skripsi hasil penelitian penulis, pada bab ini akan dibahas secara terperinci yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan.

#### **5.1 Sifat pengenaan dan tarif dalam UU No 36 Tahun 2008.**

Hasil dari analisis permasalahan jasa konstruksi ini adalah untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi cukup jelas di jelaskan dalam Undang-Undang.

Di dalam jasa konstruksi sifat pengenaan diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final), perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu yang dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Disini dapat kita lihat Perbandingan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 dengan PP No.51 tahun 2008 untuk perusahaan usaha jasa konstruksi.

Tarif pajak PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%. Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu 2%, 3%, 4% dan 6% yang membuat para pelaku usaha jasa konstruksi menjadi beragam dalam mengetahui acuan dari pada jasa konstruksi. disinilah yang menjadi kerancuan bagi wajib pajak dan banyak yang mempertanyakan ke tidak sinkronan antara tarif yang diatur di PPh Pasal 23 UU PPh 2008 dengan tarif yang diatur Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008. Sebagai contoh : tarif PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi sebesar 2% dan dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tarif diatur sebesar 2%, 3%, 4%, dan 6% . Sehingga bagi wajib pajak pemotongan tarif sebesar 3% sangat yang diatur oleh pemerintah menjadi sangat memberatkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan finalnya karena belum tentu perusahaan setiap tahunnya memperoleh laba yang besar dalam jasa konstruksi dan sebahagian dari kalangan wajib pajak atau badan hanya mengetahui pemotongan tarif untuk jasa konstruksi hanya 2% yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk pemotongan tarifnya di atur dalam pasal 23 yang telah di tentukan besar tarifnya sebesar 2%( cukup jelas dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008) dari jumlah bruto: berupa imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi. ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Pasal 23 adalah bagian Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan. Artinya PPh Pasal 23 itu adalah cicilan pajak bagi PPh Badan atau PPh Objek Pribadi. Cicilan PPh Pasal 23 yang sudah dipotong oleh pengguna jasa (pemberi penghasilan) tersebut pada akhir tahun dikreditkan oleh penerima penghasilan. Sedangkan berkaitan dengan jasa-jasa tertentu yang peraturan pemerintah-nya mengacu ke Pasal 4 ayat (2) UU PPh sudah jelas memerintahkan kepada para pemberi penghasilan. Di SPT Tahunan, penerima penghasilan akan menghitung pajaknya penghasilan untuk memotong PPh dengan tarif tertentu. Dan besaran tarif ini tidak hanya berlaku bagi pemberi penghasilan tapi berlaku juga bagi penerima secara terpisah dari penghitungan pajak umum progressif. Istilah final itu sendiri lebih tepat bagi penerima penghasilan. Sedangkan bagi pemotong atau pemberi penghasilan maka tidak ada istilah final. Kewajiban pemotong itu sama saja baik untuk jasa-jasa yang diatur di Pasal 4 ayat (2) maupun jasa-jasa yang diatur di Pasal 23 karena pada intinya sama- sama membayar pajak penghasilan untuk jasa konstruksi.

Contoh:

Pada Tanggal 10 September 2011 ada penerimaan atas penghasilan jasa konstruksi dari PT.stabilised Pavement Indo kepada PT. Hasrat-PJ.JO dan dilakukan pemotongan/ pemungutan PPh Final, yang dikenakan PPh dengan tarif 3% dari jumlah bruto, maka yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan bersifat final.



Besarnya PPh Pasal 4 ayat2 yang dipotong PT. Hasrat-PJ.JO adalah sebesar Rp.110.036.980, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= 3\% \times \text{Rp.110.036.980} = \text{Rp.3.301.109}$$

Perbandingan dari pada besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong PT.Hasrat-PJ.JO adalah sebesar Rp.110.036.980, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 2\% \times \text{Rp. 110.036.980} = \text{Rp.2.200.739}.$$

## **5.2 Wajib Pajak dalam Mengajukan Keberatan atas Sifat Pengenaan dan Tarif**

Dalam pengajuan keberatan wajib pajak harus mempunyai ketentuan dalam hukum pajak karena pada pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan .

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak puas atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak yang dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP yang terdiri dari beberapa ayat yaitu:

- Ayat 1: Atas suatu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 2: Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- Ayat 3: Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotong yang dimaksud dalam ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- Ayat 4: Keberatan tidak memenuhi syarat – syarat dalam ayat 1 sampai 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat di pertimbangkan.
- Ayat 5: Tanda penerimaan surat keberatan yang di berikan oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- Ayat 6: Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Uraian mengenai keberatan akan lebih banyak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang KUP karena pada prinsipnya pola aturan yang diatur dalam ketentuan juga dipakai oleh Undang-Undang lainnya.

Seorang pemeriksa pajak tentu banyak berbeda pendapat dengan Wajib Pajak tentang perlakuan perpajakan atas suatu transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika dalam pembahasan dengan Wajib Pajak tidak menemukan titik temu selama argumentasi pemeriksa pajak memiliki landasan yuridis, maka pendapat pemeriksa dapat dipertahankan dan hakim banding-lah yang menentukan benar tidaknya pendapat pemeriksa pajak.

Nanti KPP yang akan meneruskan surat keberatan ke kanwil. Sebelum ditetapkan hasil pemeriksaan, biasanya pada proses keberatan pemeriksa pajak juga masih dimintai jawaban keberatan dan salinan kertas kerja pemeriksaan. Artinya, penelaah keberatan nanti akan membanding-bandingkan pendapat Wajib Pajak dan pendapat pemeriksa pajak. Walaupun penelaah keberatan merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi sebenarnya penelaah keberatan berposisi sebagai hakim yang memutuskan antara posisi Wajib Pajak dan posisi pemeriksa pajak.

### **5.3 Perusahaan Dalam Menyikapi Pemotongan Tarif Jasa Konstruksi**

Perusahaan sebagai pihak yang dipotong dengan tarif 3% sangat keberatan dikarenakan perusahaan setiap tahunnya tidak selalu mendapatkan laba atau keuntungan yang besar maka dari itu dalam pembayaran pajak penghasilan jasa konstruksi yang dilakukan pemotongan oleh pemerintah karena pada dasarnya perusahaan tetap membayar pajak penghasilan dengan pemotongan tarif 3% sehingga terkadang menjadi tidak seimbang bahkan menjadi rugi bagi perusahaan.

Sebahagian besar dari pelaku usaha jasa konstruksi hanya mengacu kepada pasal 23 yang telah ditentukan pemtongan tarif pajaknya sebesar 2% dari jumlah

bruto sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang pajak penghasilan serta untuk meningkatkan efektifitas pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pajak penghasilan, yang dipandang perlu untuk mengatur kembali pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan juga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam perhitungan perpajakannya.

Untuk itu perusahaan harus lebih banyak mengetahui tentang sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang telah diatur di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 ( final) artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini perusahaan yang bergerak di dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.

Karena di dalam PP No.51 Tahun 2008 menjelaskan pemerintah telah memungut pajak penghasilan (PPh) terhadap sisa laba yang telah dibayarkan PPh akhirnya. Pemerintah menjamin pengenaan PPh ini sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. yang jelas, aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPh usaha jasa konstruksi. Akan tetapi bagi sebahagian pelaku usaha sangat memberatkan dalam membayar pajak penghasilan final yang dipotong dengan tarif 3% yang dipotong oleh Pemerintah. oleh karena itu pemerintah harus lebih konsisten dalam melakukan pemotongan tarif karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sama-sama diatur oleh pemerintah

sendiri karena sebagai acuan bagi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di tahun selanjutnya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka acuan dari pada pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan hukum , yakni mencapai keadilan ,undang-undang dan pelaksanaannya haruslah adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Dasarnya di dalam hukum pajak telah mengatur hubungan antara Pemerintah selaku Pemungut Pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajaknya yaitu: Dalam Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak.

#### **5.4 Perlakuan Beban Pajak Final yang Dipotong Oleh Pemerintah.**

Perlakuan beban pajak final dalam laporan laba rugi perusahaan sangat besar dalam membayar pajaknya dapat dilihat selisih besar dari perbedaan hasilnya sebesar Rp.37.552.014. karena di dalam laporan laba rugi perusahaan

beban pajak finalnya sebesar Rp.566.013.562 sedangkan di dalam Lampiran SPT sebesar Rp.528.461.548. Seharusnya hasil dari pada beban pajak yang terdapat dalam Laporan Keuangan perusahaan harus sesuai/sama dalam Lampiran SPT karena jelas pada saat perusahaan dalam membayar pajak semua telah diteliti kembali sebelum membayar pajak. Karena sudah diatur dalam hukum pajak formil yang menjelaskan bahwa tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan dalam melaksanakan pembayaran pajak penghasilan dan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Setelah dikonfirmasi pihak perusahaan tidak bisa menjelaskan perbedaan perhitungan beban pajak final di dalam laporan laba rugi perusahaan dengan Lampiran SPT mungkin saja perusahaan memasukkan beban pajak tahun lalu ke beban pajak tahun sekarang padahal beban pajak final tahun lalu tidak bisa digabungkan dengan tahun sekarang karena disini lah banyak terjadi kerancuan yang nanti atau kedepannya menjadi masalah dikarenakan terdapatnya perbedaan hasil. mungkin saja besarnya hasil dari beban pajak dalam perusahaan terjadi dikarenakan pengakumulasian dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak diselesaikan perlunasannya sehingga terjadi perbedaan hasil didalam lampiran SPT.

Untuk itu perusahaan lebih cermat supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pembayaran beban pajak final jasa konstruksi dalam ruang lingkup dari perusahaan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada PT.Stabilised Pavement Indo terkait permasalahan dalam sifat pengenaan tarif dalam pajak penghasilan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008.

#### **VI.1 Kesimpulan**

1. Terdapat pemotongan tarif pajak jasa konstruksi pada PT.Stabilised Pavement Indo yang dipotong oleh pemerintah sangat memberatkan perusahaan, seharusnya pemerintah lebih mengacu kepada Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 dari pada Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 untuk jasa konstruksi sebagai acuan wajib pajak.
2. Ditemukannya perusahaan dalam membayar pajak penghasilan jasa konstruksi lebih mengacu kepada Peraturan Pemerintah, seharusnya perusahaan lebih memahami dalam pasal 4 ayat 2 (final) untuk sifat pengenaannya dan Pasal 23 untuk pemotongan tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang PPh.
3. Ditemukannya pemotongan tarif yang dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang maka perusahaan dapat mengajukan Surat Keberatan yang terdapat dalam Undang-Undang KUP Pasal 25 dan untuk
4. Perusahaan dalam mengajukan Surat Keberatan harus mengetahui mekanisme dalam pengajuan keberatan sebagai upaya hukum yang diajukan ke Direktorat

Jenderal Pajak ke Kantor Pelayanan Perpajakan dimana perusahaan sebagai wajib pajak yang terdaftar.

5. Perusahaan dalam menyikapi tarif dan sifat pengenaan pada jasa konstruksi perusahaan harus banyak mengetahui undang-undang perpajakan yang terbaru untuk jasa konstruksi dalam membayar pajak penghasilan.
6. Perlakuan beban pajak final dalam perusahaan seharusnya sesuai dalam Lampiran SPT yang telah dikenakan pemotongan oleh Pemerintah dalam membayar Pajak Penghasilan final untuk Jasa Konstruksi.

## **VI. 2. Saran-Saran**

1. Sebaiknya perusahaan lebih dapat memahami dalam menentukan dari pada tarif dan sifat pengenaan jasa konstruksi mengacu kepada Undang-Undang itu cukup jelas dijelaskan di dalam UU No. 36 Tahun 2008.
2. Perusahaan harus lebih merujuk kepada PPh Pasal 23 tentang pemotongan tarif yang berlaku di dalam Undang-Undang dari pada Peraturan Pemerintah supaya tidak terjadi kerancuan bagi wajib pajak dalam pemotongan tarif yang berlaku pada jasa konstruksi dalam membayar pajak.
3. Perusahaan yang dikenakan pemotongan tarif yang tidak sesuai bisa mengajukan upaya keberatan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang KUP dalam pasal 25 sebagai acuan wajib pajak atas ketidakpuasan dalam pemotongan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah.
4. Perusahaan harus lebih teliti dalam menghitung perlakuan beban pajak final yang terdapat dalam perusahaan karena perusahaan harus membayar beban pajak sesuai dalam Lampiran SPT.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an surat Al-baqarah :177.

Al-qur'an surat Al-an'am : 141.

Al-qura'an surat Al-isra :26

Aditya, Rizky. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pada PT.Rezki Karya Megatama Teluk Kuantan.*Skripsi* .2008

Azhari, " Hukum Pajak dan Pengantar Pajak", Fakultas Ekonomi Universitas Riau , Pekanbaru.2007.

Yani Ahmad, "Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan".penerbit Kencana Prenada Media. 2004.

Setiawan Agus, " PPh Pemotongan dan Pemungutan". Penerbit raja Grafindo. 2007.

Billy Ivan Tansuria, "Pajak Penghasilan Final". Penerbit Graha Ilmu. 2011.

Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", Penerbit Raja Grafindo Persada. 2007.

Nurhayati Puji Linda, " Evaluasi kewajiban Perpajakan PPH Badan pada Jasa Konstruksi". 2011.

Pawako Ibnu Sigit, "Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)". Penerbit Raja Grafindo. 2007.

Irwansyah, Ardiansyah Lubis, Djuanda Gustian, "Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing".Penerbit Salemba Empat. 2010.

Muh. Awal Satrio Nugroho& Bambang Teguh, "Hak dan KewajibanDalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP di Indonesia". Penerbit Salemba Empat. 2008.

Mardiasmo, "Perpajakan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Revisi" Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. PT.Gramedia Pusaka Umum, Jakarta. 2011.

- Suhartono Rudy & Ilyas B.Wirawan, "Ensiklopedia Perpajakan Indonesia", Penerbit Salemba Empat. 2010.
- Soemitro, SH& Dewi Kania Sugiarti, "Asas dan Dasar Perpajakan". Edisi Revisi penerbit Refika Aditana. 2010.
- Setiawan agus, "Cara Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak", Penerbit Andi Offset. 2011.
- Purnawan Herman & Angriani Eveline, "Undang-Undang Perpajakan 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Penerbit Erlangga. 2007
- Waluyo, "Akuntansi Pajak & Perpajakan Indonesia" . Penerbit Salemba Empat. 2010
- Zakaria Jaja, "Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)". Penerbit raja Grafindo. 2005.